

**PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KEPATUHAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR) DENGAN
GEOGRAFIS PEMDA SEBAGAI VARIABEL MODERASI:
PENDAKATAN TEORI NEW INSTITUSIONAL**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Akuntansi



Disusun oleh :

Ahmad Salim

21402200001

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
TAHUN 2023**

TESIS

PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR) DENGAN GEOGRAFIS PEMDA SEBAGAI VARIABEL MODERASI: PENDAKATAN TEORI NEW INSTITUSIONAL

Disusun oleh :

Ahmad Salim

21402200001

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian tesis

Tesis

Program Magister Akuntansi Fakultas
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعة سلطان أحماد الإسلامية
Semarang, 07 September 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Edy Suprianto, SE, MSi, Akt

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Salim

Nim : 21402200001

Jurusan : Magister Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa thesis dengan judul “Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Internet Financial Reporting (IFR) Dengan Geografis Pemda Sebagai Variabel Moderasi: Pendekatan Teori New Institutional”, adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam Thesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan maupun pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan dari penulis aslinya.

Saya bersedia menarik Thesis yang telah saya ajukan, apabila sampai terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin ataupun meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas dibatalkan.

Semarang, 09 September 2023

Yang Menyatakan,

Ahmad Salim

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR). Selain itu penelitian ini juga akan menguji apakah letak geografis pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dengan pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah Pemda yang dipilih dengan menggunakan metode sensus sampling. Berdasarkan hasil uji regresi disimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR). Namun penelitian ini mampu membuktikan bahwa letak geografis pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dengan pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

Kata Kunci: kekayaan pemerintah daerah, letak geografis, dan Internet Financial Reporting

ABSTRACT

The purpose of this study is to test whether local government wealth has a significant effect on Internet Financial Reporting (IFR) disclosure. In addition, this study will also test whether the geographical location of local government is able to moderate the relationship between local government wealth and disclosure of Internet Financial Reporting (IFR). The population in this study includes all local governments in Indonesia. The sample for this research is the regional government which was selected by using census sampling method. Based on the results of the regression test, it was concluded that local government wealth did not have a significant effect on Internet Financial Reporting (IFR) disclosure. However, this research is able to prove that the geographical location of local government is able to moderate the relationship between local government wealth and Internet Financial Reporting (IFR) disclosure.

Keywords: local government wealth, geographical location, and Internet Financial Reporting

PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan thesis yang berjudul “Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Internet Financial Reporting (IFR)”. Penulisan thesis ini tidak lepas dari segala kendala dan kesulitan bila tanpa doa, bimbingan, motivasi, saran, kritik, dan bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan thesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun thesis ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE., S.Si., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan, pengarahan, saran dan kritik dalam penyusunan thesis ini.
4. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan thesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian thesis baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penulis menyadari bahwa thesis ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk masukan yang membangun agar usulan penelitian thesis ini dalam lebih sempurna.

Semarang, 25 Januari 2022

Penulis,

Ahmad Salim

DAFTAR ISI

JUDUL	1
LEMBAR PERNYATAAN.....	3
ABSTRAK.....	4
PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR LAMPIRAN.....	11
BAB 1. PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Perumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Teori New Institusional.....	17
2.2 Internet Financial Reporting (IFR).....	19
2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah	20
2.4 Geografis Pemerintah Daerah	21
2.5 Penelitian terdahulu.....	22
2.6 Pengembangan Hipotesis	27
2.6.1 Pengaruh Kekayaan Pemda terhadap IFR.....	27
2.6.2 Pengaruh Moderasi Geografis Pemda terhadap Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR	28
BAB III METODE PENELITIAN	31

3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Populasi dan Sampel	31
3.3	Sumber dan Jenis Data	31
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Variabel dan Indikator.....	32
3.5.1	Variabel Kepatuhan Internet Financial Reporting (IFR).....	32
3.5.2	Variabel Kekayaan Pemda.....	32
3.5.3	Geografis Pemda.....	33
3.5.4	Variabel Kontrol.....	33
3.6	Teknik Analisis	33
3.6.1	Uji Asumsi Klasik	34
3.6.2	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	36
3.6.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Deskripsi Sampel.....	38
4.2	Statistik Deskriptif.....	38
4.2.1	Hasil Uji Persyaratan Analisis.....	40
4.2.2	Uji Model Data Panel.....	40
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	40
4.2.4	Uji Kelayakan (Goodness of Fit) Model.....	41
4.3	Hasil Uji Hipotesis	42
4.3.1	Hasil Uji Hipotesis Pertama: Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR.	42
4.3.2	Hasil Uji Hipotesis Kedua: Geografis Pemda mampu memoderasi Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR.	43
4.4	Pembahasan.....	43
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		46
5.1	Kesimpulan.....	46

5.2 Keterbatan Penelitian dan Saran	46
5.3 Implikasi Penelitian.....	47
Daftar Pustaka.....	48



DAFTAR TABEL

Table 4.1. Sampel Penelitian	38
Table 4.2 Deskriptif Statistik	39
Table 4.3 Hasil Uji Regresi.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji LM.....	51
Lampiran 2 Uji Hausman.....	52
Lampiran 3 Uji multikolinieritas	53
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas	54
Lampiran 5 Uji autokorelasi	55
Lampiran 6 Uji Normalitas	56
Lampiran 7 Hasil Uji Pool Regression Model.....	57
Lampiran 8 Data Penelitian	58



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian tentang Internet Financial Reporting (IFR) telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Namun penelitian sebelumnya tersebut banyak berfokus pada sektor swasta misalnya Sayidah, Hayati, dan Handayani (2016), Mooduto (2015), Sulistyanto dan Nugrahanti (2013), Djuitaningsih dan Pinandito (2015), Faisal, Diantimala, dan Dinaroe (2021) Setiawan (2020), Reskino dan Sinaga (2017), Bananuka dkk. (2019), dan Mokhtar (2017). Penelitian terdahulu tentang IFR pada sektor pemerintahan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya misalnya Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2018), Perdana (2018), Diptyana (2019) dan Moehardiono dan Yuliati (2021). Namun, berdasarkan literatur review penelitian sebelumnya pada jurnal bereputasi hanya dua penelitian yaitu Rini (2016) pada Lembaga zakat dan Nosihana dan Yaya (2016) yang meneliti pada sektor pemerintah¹.

Penelitian tentang IFR pada sektor pemerintah ini sangat menarik untuk diteliti karena pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang pelayanan publik berbasis *e-government* melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan publik. Untuk memperkuat implementasi pelayanan publik diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional.

Dalam undang-undang tersebut penyelenggara pemeritahan (baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat) berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian

¹ Jurnal bereputasi adalah jurnal akreditasi sinta 2 dan terindeks scopus, dimana jurnal ini melalui proses review yang sangat bagus dan terpercaya

kinerja. Ada beberapa manfaat yang diharapkan oleh pemerintah dengan diterapkan *e-government*, yaitu mengurangi biaya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Penelitian ini mencoba menganalisis seberapa patuh pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang IFR pada pemerintahan adalah Nosihana dan Yaya (2016). Mereka meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IFR pada pemda. Faktor tersebut adalah kompetisi politik, ukuran Pemda, rasio pembiayaan (*leverage*), kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit. Mereka mengambil sampel sebanyak 175 Pemda di Indonesia pada tahun 2014. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh terhadap IFR. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa rasio *leverage*, kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

Ada beberapa kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Nosihana and Yaya (2016) tersebut. Pertama, Nosihana and Yaya (2016) menggunakan 3 teori yang berbeda dalam satu model penelitian yaitu teori agensi, teori stewardship dan teori signaling. Ketiga teori yang berbeda ini merumuskan hipotesis yang berbeda sehingga ada beberapa hipotesis yang ditolak. Menurut Umma, Kwan, dan Yon (2006) sebuah model penelitian yang baik dibangun berdasarkan satu grand teori. Kedua, penelitian ini tidak membedakan antara pemerintah daerah yang memiliki geografis yang strategis dan tidak misalnya antara pemda yang berada di pulau jawa dan di luar pulau jawa. Wardhanie (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan teknologi yang tinggi cenderung memiliki Indeks pelaporan keuangan melalui internet lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki teknologi rendah. Jadi diprediksi bahwa pemda yang di pulau jawa memiliki kapasitas SDM dan teknologi yang lebih maksimal

dibandingkan dengan pemda di luar Jawa. Ketiga, sampel yang digunakan oleh penelitian ini hanya pada 1 tahun yaitu tahun 2014. Tentu saja kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi saat ini yang telah mengalami perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi yang lebih maju.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa kekayaan pemda tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR di pemerintah daerah. Hal ini menarik untuk dikaji kembali karena penelitian sebelumnya pada sektor swasta juga terjadi perbedaan hasil misalnya Reskino dan Sinaga (2017) dan Djuitaningsih dan Pinandito (2015) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR, namun penelitian yang dilakukan oleh T. Momany, N. Al-Malkawi, dan A. Mahdy (2014) tidak mampu membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. Jika melihat pada indikator pengukuran variabel kekayaan pemda pada penelitian Nosihana dan Yaya (2016) menggunakan ukuran jumlah penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan hasil pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi dan penghasilan daerah lainnya. PAD dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa PAD dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi belum tentu dianggap sebagai daerah yang kaya jika belum dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan ukuran variabel kekayaan pemda dengan perbandingan antara jumlah PAD dengan Total Aset.

Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan di atas maka penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali faktor yang mempengaruhi IFR pada pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu dengan pendekatan teori new institusional. Penelitian ini mencoba menambahkan variabel moderasi geografis pemerintah daerah sebagai variabel moderasi. Variabel ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antar variabel yang dilakukan pada penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini juga menggunakan tahun

penelitian dari 2019 sampai dengan 2021. Penelitian ini menggunakan sampel yang lebih banyak dibandingkan penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Kewajiban publikasi laporan keuangan melalui media internet telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Namun kepatuhan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kekayaan pemerintah daerah. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Teori new institusional memberikan pandangan baru tentang pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap kepatuhan IFR. Selain itu geografis pemerintah daerah diprediksi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kekayaan pemerintah daerah terhadap kepatuhan IFR. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap IFR
2. Apakah geografis Pemda mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemda dengan IFR

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap IFR
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah letak geografis Pemda mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemda dengan IFR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang di harapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman serta mengkonfirmasi teori new institusional dapat menjelaskan fenomena pengungkapan *internet financial reporting* pada pemerintahan yang dapat menjadi referensi tambahan dalam hal akademik serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori New Institusional

Teori New Institusional menurut Meyer dan Rowan (1977) dan DiMaggio dan Powell (1983), adalah bahwa struktur dan prosedur suatu organisasi cenderung akan mirip (isomorfik) dengan struktur dan prosedur di lingkungan dimana mereka berada dan diterima secara sosial. Hal ini tentu secara sosial struktur dan prosedur sangat berdampak pada manfaat yang diperoleh dari pilihannya organisasi tersebut. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa organisasi menciptakan institusi atau menjadi isomorfik melalui tiga mekanisme, yaitu koersif, mimesis, dan normatif. Ketiga mekanisme kelembagaan ini dianggap sebagai faktor penyebab utama yang mempengaruhi bentuk suatu organisasi dilihat dari struktur dan praktik (Scott, 1991). Terkait dengan akuntansi, beberapa peneliti telah menerapkan mekanisme ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan akuntansi diterapkan pada suatu organisasi (Carmona dan Macias, 2001; Carmona dan Donoso, 2004; Collin, Tagesson, Andersson, Cato, dan Hansson, 2009; Adhikari dan Mellemvik, 2009; Timoshenko dan Adhikari, 2009). Mekanisme koersif ini terkait dengan sumber daya organisasi. Ketika suatu organisasi terjadi kelangkaan sumber daya, maka organisasi cenderung mematuhi aturan dan praktik yang disyaratkan oleh peraturan (Fein dan Mizruchi, 1999; Oliver, 1991; Tolbert dan Zucker, 1997). Di sisi lain, organisasi yang memiliki sumber daya yang banyak, organisasi berpeluang untuk menjalankan kekuasaan karena mereka dapat mematuhi aturan yang berlaku, bahkan memaksakan untuk merubah aturan yang ada (Fein dan Mizruchi, 1999).

Pada mekanisme mimesis, penciptaan sebuah institusi terkait dengan ketidakpastian lingkungan yang berasal dari penyebab ambigu atau solusi yang tidak jelas. Ambiguitas seperti itu membuat organisasi menyamar sebagai analog organisasi dengan mengadopsi struktur dan

model yang serupa (Carpenter dan Feroz, 2001). Dengan demikian, organisasi dianggap sah, karena mereka kemudian dapat bertindak sesuai dengan harapan organisasi sukses lainnya (Granlund dan Lukka, 1998). Mekanisme normatif berkaitan dengan menciptakan institusi melalui adopsi ide dan persyaratan yang disebarluaskan oleh organisasi profesi, konsultan, dan pakar. Badan profesional sebagai pembawa pengetahuan, menetapkan pedoman dan prosedur khusus dalam upaya mereka untuk membenarkan cara rasional mengelola organisasi di dalam otonomi mereka (Czarniawska dan Joerges, 1996; Czarniawska dan Sevon, 1996; Sahlin-Andersson, 2001). Kepatuhan dengan persyaratan profesional adalah diharapkan memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi, termasuk: peningkatan sumber daya dan akreditasi sosial (Oliver, 1991, hlm. 153)

Teori kelembagaan berkaitan dengan cara organisasi beradaptasi dengan lingkungannya. Itu tujuan dibentuknya struktur organisasi adalah untuk mencapai keberhasilan dengan perolehan pengakuan (legitimasi) atas semua kegiatan organisasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan keluaran (*outcome*). Salah satunya adalah praktik keuangan pemerintah daerah pelaporan melalui pengungkapan informasi keuangan daerah di website. Website adalah bentuk implementasi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan legitimasi dalam konteks kelembagaan. Implementasi peraturan yang berlaku di daerah akan membawa konsekuensi bagi daerah program kerja pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika masalah muncul di pelaksanaan program pemerintah sehingga menimbulkan asimetri informasi, akan berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Hal itulah yang kemudian menimbulkan masalah keagenan.

2.2 Internet Financial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting (IFR) menurut Oyelere dan Kuruppu (2016) adalah pelaporan keuangan berbasis internet. Sedangkan Luciana dan Sasongko (2009) mendefinisikan *Internet Financial Reporting* (IFR) sebagai tingkat pengungkapan keuangan dan *non-keuangan* melalui internet. Dolinšek et al., (2014) juga mengistilahkan IFR sebagai sebuah sarana perusahaan menerbitkan laporan tahunan mereka di situs web mereka. Dengan demikian, IFR dikaitkan dengan motif seperti mengurangi biaya penyebaran informasi, menyediakan informasi tepat waktu, meningkatkan cakupan dan jenis informasi yang diungkapkan, mendukung praktik pengungkapan berbasis kertas dan meningkatkan akses ke calon investor (Mokhtar, 2017; Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2000). Menurut Setiawan (2020) menjelaskan bahwa sebuah cara penyebaran informasi pelaporan keuangan kepada para pemangku kepentingan dari cara tradisional ke internet disebut sebagai *Internet Financial Reporting*.

Ada beberapa pengukuran *Internet Financial Reporting* yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya misalnya Setiawan (2020) mengukur IFR dengan menggunakan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ yang terdiri dari 12 dokumen keuangan yang disebutkan dalam instruksi. Sedangkan Luciana dan Sasongko (2009) mengukur IFR dengan menggunakan indeks IFR yaitu menggunakan aspek *content* (40%), *timeliness* (20%), *technology* (20%), dan *use support* (20%). Oyelere and Kuruppu (2012) mengukur IFR pada publikasi laporan keuangan tahunan melalui situs web mereka menggunakan berbagai format termasuk PDF, flash, dan html.

2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: pertama, Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah (misalnya: candi dan bangunan bersejarah). Kedua, kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang diadani dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Menurut Setyowati (2016), besarnya kekayaan yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Sedangkan menurut UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan menjelaskan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Jadi Kekayaan pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemakmuran dalam suatu daerah. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki. Kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan uang (Nosihana dan Yaya, 2016). Sedangkan Setyowati (2016), kekayaan pemerintah daerah diukur berdasarkan total aset dimiliki pemerintah daerah yang tercantum dalam neraca.

2.4 Geografis Pemerintah Daerah

Kajian geografi adalah mengkaji saling hubungan antara unsur fisik dan unsur sosial di permukaan bumi. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada hakikatnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusianya. Kondisi bentuk geografis suatu wilayah dengan suatu wilayah lainnya berbeda. Kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi penduduk wilayah tertentu. Adanya keragaman kondisi pada geografis tiap wilayah memunculkan corak mata pencaharian, pola-pola permukiman, tradisi, adat istiadat, dan aspek kehidupan sosial lainnya (Sugiharsono: 2008).

Keterjangkauan atau Aksesibilitas terkait dengan kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Aksesibilitas suatu tempat dapat dipengaruhi oleh kondisi medan serta sarana dan prasarana transportasi. Jika Kegiatan transportasi memiliki hubungan erat dengan kondisi fisik suatu daerah dan kegiatan ekonomi suatu daerah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antara jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat (Samriyah: 2012).

Adapun unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas yaitu: kondisi jalan, jenis alat angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan, dan jarak (Tarigan, 2005).

2.5 Penelitian terdahulu

Sayidah, Hayati, dan Handayani (2016) meneliti tentang pengaruh tata Kelola perusahaan terhadap IFR pada perusahaan yang memiliki skor CGPI 2012. Mereka menyimpulkan bahwa mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap perilaku pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Perusahaan dengan kualitas corporate governance bagus cenderung melaporkan IFR lebih banyak dibanding dengan perusahaan dengan kualitas corporate governance yang buruk. Hasil penelitian ini didukung oleh Sulistyanto and Nugrahanti (2013) yang membuktikan bahwa good governance perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. Virgiawan dan Diyanty (2015) menemukan bukti bahwa penerapan IFR terbukti dapat menurunkan tingkat asimetri informasi pada perusahaan.

Wardhanie (2012) meneliti tentang perbedaan disklosur IRF pada perusahaan dengan high teknologi dengan perusahaan low teknologi. Penelitian ini menggunakan 38 perusahaan dengan nilai kapitalisasi tertinggi di Indonesia menurut IDX Fact Book tahun 2011. Hasilnya disimpulkan bahwa perusahaan dengan teknologi yang tinggi cenderung memiliki Indeks pelaporan keuangan melalui internet lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki teknologi rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh Djuitaningsih and Pinandito (2015) yang membuktikan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar pengungkapan IFR. Setiawan (2020) juga menemukan indikasi bahwa level teknologi perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap implementasi IFR pada perusahaan publik di Indonesia.

Mooduto (2015) meneliti tentang pengaruh disclosure IFR terhadap reaksi investor pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh tingkat informasi pengungkapan IFR terhadap reaksi investor. Namun, tidak berhasil membuktikan bahwa ruang lingkup pengungkapan IFR berpengaruh terhadap abnormal return saham perusahaan. Hasil ini didukung penelitian yang

dilakukan oleh Satria and Supatmi (2013) yang menyatakan bahwa penerapan IFR terbukti mendorong terjadi-nya reaksi pasar yang diukur melalui variabel volume perdagangan saham dan abnormal return saham.

Nosihana dan Yaya (2016) meneliti tentang pengaruh kompetisi politik, ukuran Pemda, rasio pembiayaan (*leverage*), kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit terhadap IFR pada pemda. Mereka mengambil sampel sebanyak 175 Pemda di Indonesia pada tahun 2014. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh terhadap IFR. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa rasio *leverage*, kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*. Penelitian terdahulu lainnya tentang IFR pada sektor pemerintahan juga dilakukan oleh Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2018), Perdana (2018), Diptyana (2019) dan Moehardiono dan Yuliati (2021).

Faisal, Diantimala, and Dinaroe (2021) meneliti tentang firm size, listing age, internationalization, and auditor size terhadap IFR pada perusahaan non keuangan pada tahun 2019, yaitu 95 perusahaan Australia, 87 perusahaan Singapura, dan 85 perusahaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Singapura dan Indonesia memiliki pengungkapan CIFR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Australia. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa karakteristik perusahaan menjelaskan tingkat pengungkapan CIFR. Ukuran perusahaan, internasionalisasi, dan jenis auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CIFR di Asia Pasifik, sedangkan usia listing tidak menjelaskan tingkat CIFR. Reskino dan Sinaga (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Namun profitabilitas, Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet Financial Reporting (IFR).

Beberapa penelitian juga dilakukan di negara lain seperti Ghadi (2017) meneliti tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur kepemilikan pada 43 perusahaan yang terdaftar di Doha Securities Market (DSM). Masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan IFR dalam bentuk selain pdf. Analisis empiris juga menemukan hubungan yang signifikan antara keterlibatan IFR dan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur kepemilikan. Lain halnya T. Momany, N. Al-Malkawi, and A. Mahdy (2014) meneliti tentang pengaruh profitabilitas (ROA), likuiditas (rasio lancar), kepemilikan institusional, dan kepemilikan investor asing terhadap IFR pada 127 perusahaan yang terdaftar di pasar pertama Bursa Efek Amman (ASE) untuk tahun yang berakhir 2008/2009. Studi saat ini juga menemukan bahwa beberapa karakteristik spesifik perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional, dan kepemilikan investor asing hampir sama antara perusahaan informasi keuangan dan perusahaan informasi nonkeuangan, yang menunjukkan bahwa karakteristik tersebut mungkin tidak mempengaruhi IFR dalam perusahaan yang terdaftar di ASE.

Dolinšek, Tominc, and Skerbinjek (2014) meneliti faktor yang mempengaruhi IFR pada 110 Perusahaan di Slovenia. Selama fase penelitian pertama, penulis menetapkan bahwa 110 (52,64 persen) perusahaan besar mengungkapkan informasi keuangannya di situs webnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi IFR adalah sebagai berikut: ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, bentuk hukum dan sektor operasi. Perusahaan yang lebih besar, perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih rendah, perusahaan publik terbatas dan perusahaan sektor keuangan mengungkapkan informasi keuangan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Sedangkan Bananuka et al. (2019) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi IFR pada 40 perusahaan jasa keuangan. Unit analisis studi ini adalah perusahaan. Chief Internal Auditors dan Chief Finance Officers adalah Hasil menunjukkan bahwa kinerja peran dewan dan

kekuatan isomorfik adalah prediktor signifikan IFR. Namun, kinerja peran dewan bukanlah prediktor signifikan IFR dengan adanya kekuatan IFR tidak seperti peran layanan. Hanya isomorfisme koersif yang secara positif dan signifikan terkait dengan IFR tidak seperti isomorfisme normative dan mimetik. Kontrol dan peran strategis dewan secara positif dan signifikan terkait dengan IFR.

Amin and Mohamed (2016) persepsi 96 auditor yang bekerja di 4 Besar dan perusahaan audit terhadap IFR di Mesir. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa mayoritas auditor di Mesir setuju bahwa penerapan CA dapat mengimbangi tantangan yang terkait dengan lingkungan pelaporan keuangan Internet (IFR). Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara auditor yang bekerja di KAP Big 4 dan auditor yang bekerja di KAP lokal mengenai persepsi pengaruh CA pada beberapa aspek ketepatan waktu informasi. Bananuka (2019) meneliti tentang kontribusi modal intelektual (IC) dan kekuatan isomorfik (IF) terhadap IFR pada 40 perusahaan jasa keuangan Uganda. Hasil menunjukkan bahwa IC dan IF merupakan prediktor signifikan IFR di antara perusahaan jasa keuangan di Uganda. Namun, IF berkontribusi signifikan terhadap IFR ketika IC tidak ada. Bin-Ghanem and Ariff (2016) meneliti pengaruh efektivitas dewan direksi dan komite audit terhadap IFR di 152 perusahaan keuangan yang terdaftar terletak di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan direksi dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan IFR.

Botti et al. (2014) meneliti tentang boards of directors terhadap IFR di 32 perusahaan yang terdaftar di Prancis yang termasuk dalam indeks CAC40 per Desember 2007. Dewan direksi tampaknya efektif kebijakan pengungkapan. Pengawasan dewan yang tidak efisien dan pengawasan eksekutif puncak memberikan memantau eksekutif puncak perusahaan-perusahaan ini, yang meningkatkan keputusan pengungkapan mereka, termasuk meningkatkan level IFR. (Mokhtar 2017) melakukan meta analisis terhadap penelitian tentang IFR. Hasilnya

menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, jenis auditor dan pelaporan internet. Hasil mengkonfirmasi prediksi teori agensi, teori pensinyalan, hipotesis biaya politik dan teori difusi inovasi. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa perlindungan investor, maskulinitas, pembangunan ekonomi, konstruksi indeks pengungkapan dan proksi pengukuran untuk variabel independen memoderasi hubungan antara profitabilitas, leverage, dan pelaporan internet

Nurunnabi and Hossain (2012) meneliti pengaruh usia, ukuran, profitabilitas, industri dan komite audit terhadap IFR pada 285 perusahaan yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) dan Chittagong Stock Exchange (CSE) di Bangladesh pada tahun 2009. Temuan mengungkapkan bahwa hanya 29,12 persen (83) perusahaan memiliki situs web dari 285 perusahaan yang terdaftar dan hanya 33,34 persen (28) perusahaan yang menyediakan informasi keuangan. Dari tujuh variabel, hanya perusahaan audit besar dan variabel non-kepemilikan keluarga yang secara signifikan terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penting lainnya mengungkapkan bahwa meskipun persyaratan wajib memiliki komite audit di Bangladesh, perusahaan tanpa komite audit lebih banyak mengungkapkan informasi sukarela dan ini menimbulkan pertanyaan tentang kurangnya penegakan peraturan di Bangladesh. (Oyelere and Kuruppu 2012) meneliti tentang pengungkapan sukarela IFR pada 132 perusahaan yang *listed* pada *Abu Dhabi Securities Exchange* (67) dan *Dubai Financial Market* (65) in the UAE. Sementara sekitar 87 persen perusahaan yang terdaftar di UEA ditemukan mengoperasikan situs web, hanya 88 dari perusahaan ini (sekitar 67 persen) yang menggunakan situs web mereka untuk menyampaikan informasi keuangan. Namun, IFR tidak terbatas pada publikasi laporan keuangan tahunan saja karena perusahaan juga mengungkapkan ikhtisar keuangan melalui situs web mereka menggunakan berbagai format termasuk PDF, flash, dan html.

Dunne et al. (2013) melakukan survey tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengadopsi XBRL di UK. Hasil survei kuesioner di Inggris menunjukkan bahwa kesadaran XBRL, dan pelaporan generasi kedua secara lebih umum, berada di juara utama tetapi ada sedikit difusi di luar rangkaian pemangku kepentingan yang sempit ini. Keterlibatan regulasi tampaknya menjadi satu-satunya dorongan untuk difusi dan saluran komunikasi yang lebih baik dalam jaringan pemangku kepentingan, seperti antara regulator, pembuat, pengguna dan komunitas XBRL diperlukan. Makalah ini menunjukkan bahwa saat ini dorongan pasokan untuk XBRL gagal menghasilkan penggunaan teknologi ini secara efektif di Inggris. Komitmen regulasi yang lebih besar sekarang diperlukan untuk menciptakan dorongan bagi XBRL seperti membuat alat dan menyediakan penyimpanan data XBRL yang tersedia untuk umum dan dapat diakses. Pinto dan Ng Picoto (2016) meneliti tentang pengaruh IFR terhadap kinerja 78 perusahaan nonkeuangan di FTSE100 antara Maret dan April 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa kombinasi IFR dengan risiko dan umur panjang adalah konfigurasi untuk kinerja tinggi. Lebih jauh, hasilnya menunjukkan tiga konfigurasi berbeda untuk kinerja rendah. Konfigurasi ini menekankan pentingnya IFR pada perusahaan berkinerja rendah.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kekayaan Pemda terhadap IFR

Berdasarkan pada teori new institusional menyebutkan bahwa menurut Meyer dan Rowan (1977) salah satu mekanisme yang menentukan suatu organisasi adalah mekanisme koersif. Mekanisme koersif ini terkait dengan sumber daya organisasi. Ketika suatu organisasi terjadi kelangkaan sumber daya, maka organisasi cenderung mematuhi aturan dan praktik yang disyaratkan oleh peraturan dengan batasan tertentu dibandingkan dengan daerah yang memiliki

sumberdaya yang melimpah (Fein dan Mizruchi, 1999; Oliver, 1991; Tolbert dan Zucker, 1997).

Daerah yang memiliki kekayaan yang lebih banyak akan cenderung melaporkan IFR melalui websitenya secara maksimal. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kemampuan untuk membayar atau dapat memaksa sumberdaya yang dimilikinya untuk melaporkan IFR. Namun pemerintah daerah yang kecil baik dari sumber daya dan kekayaannya cenderung akan melaporkan IFR semampu mereka sehingga cenderung akan terjadi keterlambatan pelaporan karena tidak mampu membayar sumberdaya yang dimilikinya.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Mokhtar (2017) dan Ghadi (2017) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara profitabilitas dengan pelaporan internet. Hal ini didukung oleh Reskino dan Sinaga (2017) dan Djuitaningsih dan Pinandito (2015) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. Dari penjabaran di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR

2.6.2 Pengaruh Moderasi Geografis Pemda terhadap Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR

Dalam teori new institusional disebutkan organisasi yang memiliki sumber daya yang banyak, organisasi berpeluang untuk menjalankan kekuasaannya untuk mematuhi aturan yang berlaku, bahkan memaksakan untuk merubah aturan yang ada (Fein dan Mizruchi, 1999). Keeler (1987) menambahkan bahwa status sosial dan jumlah kekuasaan menentukan kepribadian dalam budaya.

IFR merupakan sebuah bentuk e-governance yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang secara geografis terletak di pulau Jawa cenderung memiliki pengalaman yang mumpuni, dan didukung oleh teknologi yang lebih cepat sehingga akan lebih kreatif dibandingkan dengan pemerintah

daerah yang belum berpengalaman dan minim teknologi. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang kaya dan berada di pulau jawa cenderung akan melaporkan IFR lebih aktif.

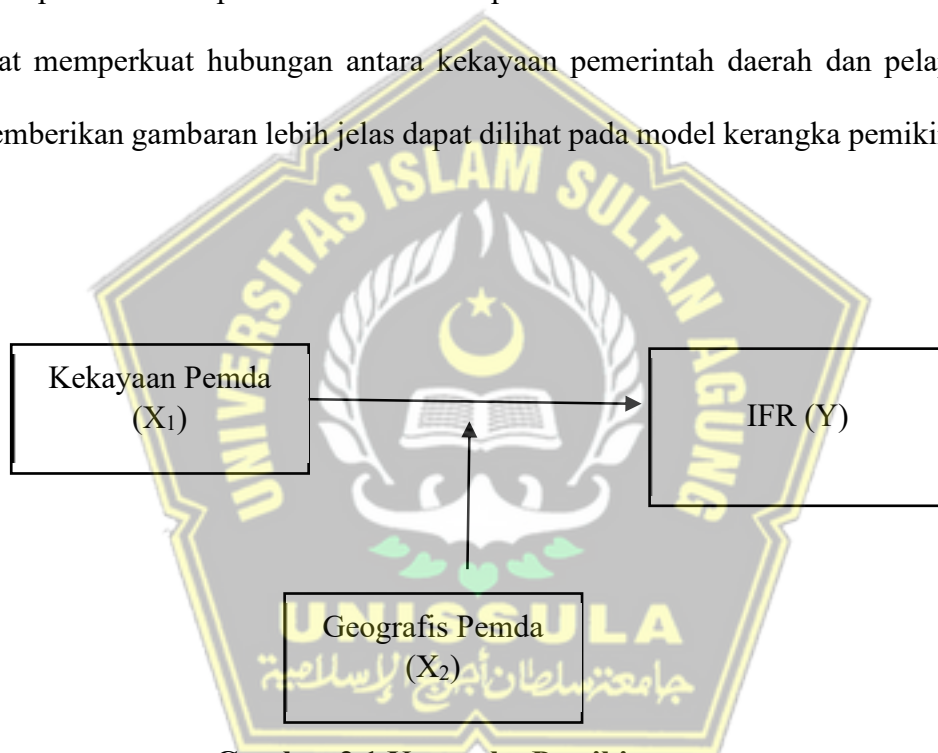
Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) menemukan indikasi bahwa level teknologi perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap implentasi IFR pada perusahaan publik di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardhanie (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan teknologi yang tinggi cenderung memiliki Indeks pelaporan keuangan melalui internet lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki teknologi rendah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Geografis Pemda mampu memoderasi Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR



2.1 Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori new institusional. Pada teori new institusional menyebutkan bahwa organisasi terjadi kelangkaan sumber daya, maka organisasi cenderung mematuhi aturan dan praktik yang disyaratkan oleh peraturan dengan batasan tertentu dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumberdaya yang melimpah (Fein dan Mizruchi, 1999; Oliver, 1991; Tolbert dan Zucker, 1997). Jadi dalam penelitian ini mencoba menganalisis apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pelaporann IFR. Dalam penelitian ini peneliti memberikan penambahan satu variabel moderasi geografis yang dapat memperkuat hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dan pelaporan IFR. Untuk memberikan gambaran lebih jelas dapat dilihat pada model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Wiratna, 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap pelaporann IFR. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi apakah variabel moderasi geografis dapat memperkuat hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dan pelaporan IFR pada pemerintah daerah di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah Pemda yang dipilih dengan menggunakan metode *sensus sampling*. Teknik ini digunakan untuk dapat memperoleh semua data dari semua pemerintah daerah di Indonesia tentang kepatuhan publikasi laporan keuangan melalui website untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data publikasi laporan keuangan Pemda yang diperoleh dari masing masing website resmi pemerintah yang tersedia atau Pusat Informasi atau Komunikasi BPK RI. Data tentang letak geografis pemda diperoleh dari google.com.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder, seluruh data laporan keuangan pemerintah daerah yang berasal dari situs resmi website resmi pemerintah yang tersedia, Pusat Informasi, Komunikasi BPK RI dan google.com

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Kepatuhan Internet Financial Reporting (IFR)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan *internet financial reporting* atau tersedianya informasi keuangan daerah di dalam situs pemerintah. Pengukuran IFR dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Oyelere dan Kuruppu (2012) yaitu publikasi laporan keuangan tahunan melalui situs web mereka menggunakan berbagai format termasuk PDF, flash, dan html. Jadi variable IFR merupakan *variable dummy* dimana 1 untuk pemda yang laporan keuangannya dapat diakses di website dalam bentuk apapun, sedangkan 0 untuk pemda yang laporan keuangannya tidak dapat diakses di website dalam bentuk apapun.

3.5.2 Variabel Kekayaan Pemda

Kekayaan Pemda didefinisikan pada seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut (Ghadi, 2017). PAD merupakan sumber keuangan yang berasal dari Pemda itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan daerah tersebut. Variabel kekayaan daerah dapat diukur dengan total PAD dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

3.5.3 Geografis Pemda

Definisi variabel geografis pemda menurut BPS adalah letak suatu pemerintah daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Variabel geografis pemda dimana yang diukur dengan menggunakan variable dummy 1 untuk pemerintah daerah di pulau jawa dan 0 untuk pemerintah daerah di luar pulau jawa.

3.5.4 Variabel Kontrol

Variabel control dalam penelitian ini adalah variable ukuran pemda dan tipe pemda. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan total asset pemerintah daerah, sedangkan tipe pemerintah daerah yang diukur dengan variable dummy 1 untuk pemerintah provinsi, 2 untuk pemerintah kabupaten dan 3 untuk pemerintah kota. Variabel ukuran pemerintah daerah ini untuk menghilangkan pengaruh besar kecilnya pemerintah daerah terhadap kepatuhan IFR, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki kemungkinan sumber pendapatan dana perimbangan yang berbeda, sehingga variabel ini dimasukan untuk menghilangkan pengaruh tipe pemda yang dapat mempengaruhi kepatuhan IFR.

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan uji logistik regresi berganda. Model penelitian ini dapat dirumuskan dengan persamaan statistik untuk regresi *pure moderation* sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{p}{1-p} \right) = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 KP * Geo + \beta_3 Geo + VarKontrol + \varepsilon$$

Keterangan :

p adalah peluang pemda patuh mempublikasikan *internet financial reporting*.

KP adalah variabel kekayaan pemerintah daerah

Geo adalah variabel Geografis Pemda

VarKontrol adalah beberapa variabel kontrol yang terdiri dari variabel ukuran pemda dan tipe pemda.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dibantu dengan program STATA. Data yang digunakan adalah data panel. Keuntungan penggunaan data panel menurut Gujarati (2004) adalah pertama, estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit. Kedua, dengan data panel, data lebih informatif, mengurangi kolinearitas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan dan lebih efisien, dan ketiga, data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan. Jika sampel dalam penelitian ini menunjukkan data yang tidak lengkap maka akan mengakibatkan unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi time series tidak sama yang disebut dengan data panel *unbalance* (Gujarati, 2004).

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Tujuan pengujian ini adalah agar memenuhi sifat estimasi regresi yang tidak bias dan telah memenuhi persyaratan *unbiased linear estimation* dan memiliki varian minimum atau sering disebut dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) yakni data berdistribusi normal, tidak terdapat heteroskedasitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual atau confounding dalam model regresi berdistribusi normal. Uji statistik non parametrik (K-S) Kolmogorov-Smirnov merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi

normal atau tidak. Hipotesis dikembangkan untuk uji K- S: H_0 : Data residual mengikuti distribusi normal H_A :Data residual berdistribusi normal jika hasil statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) nonparametrik menunjukkan nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05; jika tidak, data tidak terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya model regresi mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang baik. Variabel independen tidak ortogonal jika berkorelasi satu sama lain. Kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah model regresi memiliki multikolinieritas atau tidak: Tidak ada variabel dengan nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai toleransi kurang dari 0,10.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam model regresi linier antara galat interferensi pada periode sebelumnya atau $t-1$ dengan galat pengganggu pada periode t . Masalah autokorelasi adalah masalah di mana ada korelasi. Autokorelasi terjadi ketika pengamatan yang berbeda dihubungkan satu sama lain dari waktu ke waktu. Residual, atau kesalahan pengganggu, tidak terlepas dari setiap pengamatan, yang mengakibatkan masalah ini. Hal ini sering diamati pada data deret waktu sebagai akibat gangguan pada orang atau kelompok yang sama selama periode berikutnya. Karena gangguan pada berbagai pengamatan berasal dari individu dan bukan kelompok, masalah autokorelasi dalam data lintas waktu relatif jarang terjadi. Model regresi bebas autokorelasi adalah model yang baik. Uji Durbin- Watson (test DW) hanya mendeteksi autokorelasi tingkat satu (autokorelasi orde satu), membutuhkan intersep (konstanta) dalam model regresi, dan tidak ada variabel lag antar variabel independen untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hipotesis berikut akan diuji:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$) H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Homoskedastisitas adalah ketika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap sama, sedangkan heteroskedastisitas adalah ketika berbeda. Satu dengan homoskedastisitas atau tanpa heteroskedastisitas adalah model regresi yang baik. Karena data cross-sectional dikumpulkan dalam berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar), seringkali mengandung situasi heteroskedastisitas. (Mousavi., 2022) menegaskan Menggunakan Uji Glejser untuk menentukan apakah ada atau tidak. Tes Glejser mengusulkan untuk mengembalikan nilai langsung dari sisa ke nilai faktor bebas. Jika nilai probabilitas secara signifikan lebih tinggi dari 0,05, maka model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas; Namun, jika nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05, model regresi menunjukkan heteroskedastisitas.

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan menjelaskan variasi variabel dependen diukur dengan uji koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi memiliki nilai dalam rentang 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang sangat kecil untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Jika variabel independen memiliki nilai mendekati 1, ini menunjukkan bahwa mereka mengandung hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Karena perbedaan yang besar antara setiap observasi, cross-data biasanya memiliki koefisien determinasi yang rendah, sedangkan data time series biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi.

3.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t-statistik menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel penjelas atau independen terhadap variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan berikut digunakan untuk menguji hipotesis ini: Pada tingkat kepercayaan 5%, H_0 dapat ditolak jika nilai t lebih besar dari 5% dan H_0 dapat diterima jika nilai t lebih kecil dari 5%.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Tabel 1 menunjukkan prosedur pengambilan sampel. Berdasarkan Kepmendagri No. 050-145/2022, jumlah pemerintah daerah yang ada di Indonesia sejumlah 548 pemerintah daerah terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota. Pada kurun waktu 3 tahun (tahun 2019 sampai dengan tahun 2021) tidak ada penambahan dan pengurangan pemerintah daerah. Berdasarkan metode sensus sampling yang telah ditetapkan, 1,644 sampel (pemerintah-tahun). Kemudian sebanyak 18 dikeluarkan karena ada 6 pemerintah daerah selama tiga tahun tidak memiliki data lengkap. Jadi total sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1.626 observasi.

Table 4.1. Sampel Penelitian

No	Keterangan	2019	2020	2021	Total
1	Pemerintah Daerah	548	548	548	1,644
2	Pemda tidak memiliki Data lengkap	(6)	(6)	(6)	(18)
	Total Sampel	542	542	542	1.626

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa nilai variabel IFR rata-rata sebesar 0,295. Nilai rata-rata tersebut berada di bawah nilai 0,5 yang berarti bahwa rata-rata pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini sangat minim sekali melaporkan laporan keuangan di dalam web yang dimiliki. Hal ini dapat diartikan juga bahwa 29,5%

sampel pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangan nya di website masing-masing. Untuk variable size atau ukuran pemerintah daerah nilai rata-rata adalah 704 (Triliun rupiah), artinya bahwa rata-rata pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebesar adalah 704 (Triliun rupiah). Nilai minimal adalah adalah 1,140 (miliar rupiah), artinya bahwa pemerintah daerah paling kecil dilihat dari total asset nya adalah 1,140 (miliar rupiah) yaitu pemerintah kota bontang pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 545 Triliun rupiah, artinya bahwa pemerintah daerah paling besar dilihat dari total assetnya adalah 545 Triliun rupiah yaitu pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021.

Table 4.2 Deskriptif Statistik

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ifr	1,626	.2945879	.4559976	0	1
size	1,626	7.04e+12	2.35e+13	1.14e+11	5.45e+14
lnsize	1,626	28.9625	1.067976	22.5521	33.88554
pad	1,626	5.26e+11	2.32e+12	2.59e+09	4.57e+13
jmlpenduduk	1,626	849576.7	2989464	13804	4.99e+07
kekayaan	1,626	883016.5	2102015	2190.57	3.84e+07
lnke	1,626	13.03491	1.051468	7.691917	17.46398
geografis	1,626	.2195572	.414074	0	1
tipe	1,626	2.105781	.469242	1	3

Variabel kekayaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 883.016 artinya adalah rata-rata pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kekayaan sebesar Rp 883.016 untuk setiap 1 orang warganya. Nilai tertinggi adalah Rp 38,4 juta perorang yaitu pemerintah provinsi sumatera utara pada tahun 2020, dan nilai terendah adalah Rp 2,190 perorang yaitu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020. Variabel geografis rata-rata sebesar 0,219 artinya adalah hanya 21,9 % pemerintah daerah di Indonesia berada di luar pulau jawa, sedangkan 78,1% berada di pulau jawa. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah di Indonesia lebih banyak terpusat di pulau jawa.

4.2.1 Hasil Uji Persyaratan Analisis

Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.626 sampel (perusahaan-tahun) yang diolah dengan alat analisis STATA. Ada beberapa uji yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

4.2.2 Uji Model Data Panel

Analisis regresi berganda dengan data panel memerlukan beberapa pengujian penentuan model terbaik. Uji pertama yang dilakukan adalah uji Lagrange Multiplier (LM) dengan menggunakan metode Breusch Pagan untuk menentukan model yang terbaik antara Common Effect atau Random Effect. Berdasarkan hasil uji LM pada Lampiran 1 diperoleh nilai P-Value kurang dari 0,05 maka model estimasi terbaik adalah model Random Effect dibandingkan dengan model Common Effect. Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji Hausman untuk memilih model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat. Berdasarkan hasil uji Hausman pada Lampiran 4 diperoleh prob-chi2 lebih dari 5% maka jadi dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai dalam penelitian ini adalah Random Effect Model.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik yang mencakup beberapa uji diantaranya adalah uji normalitas, multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji spiro-wilk w test pada lampiran 6 diperoleh nilai tingkat signifikansi 0,00. Jadi data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal. Kemudian dilakukan transformasi data dengan Ln, selanjutnya dilakukan kembali uji normalitas tetapi menghasilkan nilai signifikansi yang sama. Meskipun demikian menurut Gujarati (2004) bahwa data besar tidak perlu memenuhi asumsi data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas pada Lampiran 3 diperoleh nilai nilai korelasi antar semua variabel di bawah 0,90. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas pada Lampiran 4 juga diperoleh nilai prob-chi2 sebesar 0,00 maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi diperoleh nilai probability F lebih dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa model tidak terjadi masalah autokorelasi. Meskipun demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized Least Squares (GLS) yang hanya mengasumsikan data bebas multikolinieritas (Gujarati, 2004).

4.2.4 Uji Kelayakan (Goodness of Fit) Model

Uji kelayakan model pertama dengan melihat hasil Uji Wald Chi2. Berdasarkan hasil uji Wald Chi2 pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Wald Chi2 hitung sebesar 70,76 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi *uji good of fit*. Sedangkan untuk uji koefisien determinasi (*goodness of fit*) dinotasikan dengan R-squares diperoleh nilai sebesar 0,06. Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi sama dengan 0,06, artinya bahwa variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sebesar 6 %, sedangkan 94% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model dalam penelitian ini.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 akan disajikan pada Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.

Table 4.3 Hasil Uji Regresi

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	1,626
Group variable: nama	Number of groups	=	543
R-sq:	Obs per group:		
within = 0.0060	min =		2
between = 0.1069	avg =		3.0
overall = 0.0677	max =		3
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(5)	=	70.76
	Prob > chi2	=	0.0000

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lnke	-.011515	.0166911	-0.69	0.490	-.0442289	.0211989
geografis	.2631349	.0364582	7.22	0.000	.1916782	.3345916
mod	.0007005	.0003309	2.12	0.034	.0000519	.0013491
lnsize	.0144326	.0122576	1.18	0.239	-.0095917	.038457
tipe	-.0344951	.0310663	-1.11	0.267	-.0953839	.0263937
_cons	-.2220209	.4049612	-0.55	0.584	-1.01573	.5716885
sigma_u	.27285543					
sigma_e	.34674695					
rho	.38241594	(fraction of variance due to u_i)				

4.3.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama: Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR.

Hipotesis 1a dalam penelitian ini adalah Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. Berdasarkan pada hasil uji regresi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel LnKe sebesar -0,011 dan probability value sebesar 0,490, sehingga **hipotesis 1a ditolak** karena nilai signifikansi di diatas 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kekayaan Pemda tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR Dengan kata lain

bahwa besar kecilnya kekayaan Pemda tidak mempengaruhi pengungkapan IFR pemerintah daerah.

4.3.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua: Geografis Pemda mampu memoderasi Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR.

Hipotesis 2a dalam penelitian ini adalah Geografis Pemda mampu memoderasi Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR. Berdasarkan pada hasil uji regresi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel mod sebesar 0,007 dengan probability value sebesar 0,034. Nilai sinifikansi ini dibawah 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Dengan kata lain bahwa Geografis Pemda mampu memoderasi Hubungan antara Kekayaan Pemda dengan IFR. Letak geografis sebuah pemerintah daerah menentukan besarnya pengungkapan IFR oleh pemerintah daerah.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah mengungkapkan laporan keuangannya melalui internet di web masing-masing. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya seperti Reskino dan Sinaga (2017), Djuitaningsih dan Pinandito (2015), Mokhtar (2017) dan Ghadi (2017) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kinerja keuangan dengan pelaporan internet. Hal ini juga bertentangan dengan teori new institusional menyebutkan bahwa ketika suatu organisasi terjadi kelangkaan sumber daya, maka organisasi cenderung mematuhi aturan dan praktik yang disyaratkan oleh peraturan dengan batasan tertentu dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumberdaya yang melimpah (Fein dan Mizruchi, 1999; Oliver, 1991; Tolbert dan Zucker, 1997).

Hipotesis awal menyatakan bahwa ketika pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang lebih banyak akan cenderung melaporkan IFR melalui websitenya secara maksimal, karena mereka memiliki kemampuan untuk membayar atau dapat memaksa sumberdaya yang dimilikinya untuk melaporkan IFR. Namun pemerintah daerah yang kecil baik dari sumber daya dan kekayaannya cenderung akan melaporkan IFR semampu mereka sehingga cenderung akan terjadi keterlambatan pelaporan karena tidak mampu membayar sumberdaya yang dimilikinya. Hipotesis ini tidak terbukti karena pengungkapan IFR pada sampel penelitian ini sangat rendah yaitu sebesar 0,295. Nilai rata-rata tersebut berada di bawah nilai 0,5 yang berarti bahwa rata-rata pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini sangat minim sekali melaporkan laporan keuangan di dalam web yang dimiliki. Hal ini bertolak belakang dengan nilai kekayaan pemerintah daerah rata-rata cukup besar yaitu sebesar Rp 883.016 untuk setiap 1 orang warganya.

Untuk membuktikan pernyataan ini, jika melihat pada data penelitian sebagai contoh pemerintah provinsi sumatera utara sebagai pemerintah daerah yang memiliki kekayaan tertinggi dalam sampel ini. Meskipun pemerintah provinsi sumatera utara ini memiliki web site dan menyatakan bahwa laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, namun tidak mempublikasikan laporan keuangannya dalam web tersebut selama masa penelitian ini. Contoh kedua adalah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 dengan nilai kekayaan daerah yang terendah. Pemerintah daerah ini justru melaporkan laporan keuangannya di dalam *web site* nya. Hal ini memberikann gambaran bahwa ada sesuatu yang menarik dalam penelitian ini, karena ada kesadaran yang berbeda dalam mempublikasikan laporan keuangan secara online.

Meskipun hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan IFR, namun hasil penelitian ini mampu membuktikan bahwa letak geografis pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dengan pengungkapan IFR. Dengan kata lain bahwa daerah yang memiliki kekayaan tinggi dan berada di geografis pulau jawa ternyata memiliki tingkat pengungkapan IFR yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori new institusional disebutkan organisasi yang memiliki sumber daya yang banyak, organisasi berpeluang untuk menjalankan kekuasaannya untuk mematuhi aturan yang berlaku, bahkan memaksakan untuk merubah aturan yang ada (Fein dan Mizruchi, 1999). Keeler (1987) menambahkan bahwa status sosial dan jumlah kekuasaan menentukan kepribadian dalam budaya. Pemerintah daerah yang secara geografis terletak di pulau jawa cenderung memiliki pengalaman yang mumpuni, dan didukung oleh teknologi yang lebih cepat sehingga akan lebih kreatif dibandingkan dengan pemerintah daerah yang belum berpengalaman dan minim teknologi. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang kaya dan berada di pulau jawa cenderung akan melaporkan IFR lebih aktif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) menemukan indikasi bahwa level teknologi perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap implemtasi IFR pada perusahaan publik di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardhanie (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan teknologi yang tinggi cenderung memiliki Indeks pelaporan keuangan melalui internet lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki teknologi rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).
2. Letak geografis pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara kekayaan pemerintah daerah dengan pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Fenomena justru menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang kecil mengungkapkan IFR dibandingkan pemerintah daerah yang besar. Penelitian ini tidak memperhatikan jumlah penduduk yang produktif dengan yang tidak produktif yang kemungkinan menjadi pembagi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian selanjutnya untuk dapat membedakan jumlah penduduk yang produktif dengan tidak sehingga menghasilkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini.
2. Hasil nilai R² sebesar 6% saja. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variable independent terhadap IFR hanya 6% saja, sedangkan 94% dipengaruhi oleh variable lain di luar model ini. Hal ini dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variable lain, misalnya umur pemerintah daerah, variabel kepala daerah, atau faktor politik dapat juga mempengaruhi pengungkapan IFR pemerintah daerah.

5.3 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan akuntansi digital khususnya bagaimana peran teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Penelitian ini juga memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah



Daftar Pustaka

- Alhajjriana, Gusti Indira, Wahyudin Nor, and Rano Wijaya. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 17(2): 100.
- Amin, Hala M.G., and Ehab K.A. Mohamed. 2016. "Auditors' Perceptions of the Impact of Continuous Auditing on the Quality of Internet Reported Financial Information in Egypt." *Managerial Auditing Journal* 31(1): 111–32.
- Bananuka, Juma. 2019. "Intellectual Capital, Isomorphic Forces and Internet Financial Reporting." *Journal of Economic and Administrative Sciences* 36(2): 110–33.
- Bananuka, Juma, Sadress Night, Muhammed Ngoma, and Grace Muganga Najjemba. 2019. "Internet Financial Reporting Adoption: Exploring the Influence of Board Role Performance and Isomorphic Forces." *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* 24(48): 266–87.
- Bin-Ghanem, Hasan, and Akmalia M. Ariff. 2016. "The Effect of Board of Directors and Audit Committee Effectiveness on Internet Financial Reporting Evidence from Gulf Cooperation Council Countries." *Journal of Accounting in Emerging Economies* 6(4): 429–48.
- Botti, Laurent, Sabri Boubaker, Amal Hamrouni, and Bernardin Solonandrasana. 2014. "Corporate Governance Efficiency and Internet Financial Reporting Quality." *Review of Accounting and Finance* 13(1): 43–64.
- Diptyana, Pepie. 2019. "Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Internet Financial Reporting." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 7(3): 513–30.
- Djuitaningsih, Tita, and Pinandito. 2015. "Determinan Internet Financial Reporting Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Riset* 4(2): 946–60.
- Dolinšek, Tatjana, Polona Tominc, and Andreja Lutar Skerbinjek. 2014. "The Determinants of Internet Financial Reporting in Slovenia." *Online Information Review* 38(7): 842–60.
- Dunne, Theresa, Christine Helliar, Andy Lymer, and Rania Mousa. 2013. "Stakeholder Engagement in Internet Financial Reporting: The Diffusion of XBRL in the UK." *British Accounting Review* 45(3): 167–82. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bar.2013.06.012>.

- Faisal, Cut Nadhirah, Yossi Diantimala, and Dinaroe Dinaroe. 2021. "Corporate Internet Financial Reporting: A Cross Country Analysis in The Asia Pacific." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 8(1): 27–46.
- Ghadi, Mohammed Yasin. 2017. "Journal of Economic and Administrative Sciences." *Journal of Economic and Administrative Sciences* 33(1): 1–18. <http://dx.doi.org/10.1108/JEAS-03-2016-0005>.
- Moehardiono, Irna Amelia, and Anik Yuliati. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* 12(3): 717–27.
- Mokhtar, Ekramy Said. 2017. "Internet Financial Reporting Determinants: A Meta-Analytic Review." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 15(1): 116–54.
- Mooduto, William Indra S. 2015. "Reaksi Investor Atas Pengungkapan Internet Financial Reporting." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 3(2): 479–92.
- Nosihana, Ariefia, and Rizal Yaya. 2016. "Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 3(2): 89–104.
- Nurunnabi, Mohammad, and Monirul Alam Hossain. 2012. "The Voluntary Disclosure of Internet Financial Reporting (IFR) in an Emerging Economy: A Case of Digital Bangladesh." *Journal of Asia Business Studies* 6(1): 17–42.
- Oyelere, Peter, and Nirosh Kuruppu. 2012. "Voluntary Internet Financial Reporting Practices of Listed Companies in the United Arab Emirates." *Journal of Applied Accounting Research* 13(3): 298–315.
- Perdana, Praditya Putra. 2018. "Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 7(1): 1–21.
- Pinto, Inês, and Winnie Ng Picoto. 2016. "Configurational Analysis of Firms' Performance: Understanding the Role of Internet Financial Reporting." *Journal of Business Research* 69(11): 5360–65.

- Reskino, and Nova Ninda Jufrida Sinaga. 2017. "Kajian Empiris Internet Financial Reporting Dan Praktek Pengungkapan." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 16(2): 161–80.
- Rini, Rini. 2016. "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7(2): 288–306.
- Satria, Rendi, and . Supatmi. 2013. "Reaksi Pasar Sebelum Dan Sesudah Internet Financial Reporting." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15(2): 86–94.
- Sayidah, Nur, Nur Hayati, and Alberta Esti Handayani. 2016. "Corporate Governance Dan Internet Financial Reporting." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7(3): 491–503.
- Setiawan, Antonius Singgih. 2020. "Level Teknologi, Foreign Ownership, Dan Implementasi Internet Financial Reporting." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 12(2): 317–31.
- Sulistyanto, Handita Rachma, and Yeterina Widi Nugrahanti. 2013. "Analisis Perbedaan Ketepatan Waktu Internet Financial Reporting Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5(2): 146–56.
- T. Momany, Munther, Husam-Aldin N. Al-Malkawi, and Ebrahim A. Mahdy. 2014. "Internet Financial Reporting in an Emerging Economy: Evidence from Jordan." *Journal of Accounting in Emerging Economies* 4(2): 158–74.
- Virgiawan, I Putu Yogi, and Vera Diyanty. 2015. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Keluarga Dan Internet Financial Reporting (Ifr) Terhadap Asimetri Informasi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 12(2): 123–46.
- Uma Sekaran, Kwan Men Yon, Yon, Kwan Men. 2006. *Metodologi penelitian untuk bisnis. Jilid 2. Edisi 4 . Jakarta Salemba Empat*
- Wardhanie, Nadia Shelly. 2012. "Analisis Internet Financial Reporting Index; Studi Komparasi Antara Perusahaan High-Tech Dan Non High-Tech Di Indonesia." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 287–300.